

***THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES, BUDGET PLANNING, BUDGET EXECUTION, PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES AND ADMINISTRATIVE RECORDS ON THE ABSORPTION OF THE CENTRAL JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT'S BUDGET***

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN PENCATATAN ADMINISTRASI TERHADAP PENYERAPAN APBD PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**Novianti Mugi Rahayu<sup>1</sup>, Sri Isnowati<sup>2</sup>**

Program Studi Magister Manajemen Universitas Stikubank Semarang<sup>1,2</sup>

[noviantimugirahayu2242020012@mhs.unisbank.ac.id](mailto:noviantimugirahayu2242020012@mhs.unisbank.ac.id)<sup>1</sup>, [isnowati@edu.unisbank.ac.id](mailto:isnowati@edu.unisbank.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Regional autonomy provides freedom to manage resources in accordance with local interests, priorities and opportunities, as well as being accountable to the public. The budget plays a crucial role in Regional Government, because the budget is used to carry out the program of activities planned by the agency. Every agency is required to be transparent, accountable, efficient and effective in using the budget to create good governance. This research focuses on a quantitative approach with the aim of explaining numerical data analysis using statistical methods to determine the influence of human resource quality, budget implementation, budget planning, procurement of goods and services, and administrative records on the absorption of the Central Java Provincial Government's APBD. The data used is primary data obtained directly from participants through filling out questionnaires. The research population consisted of 42 Regional Apparatus Organizations (OPD) in the Central Java Provincial Government, and the total sample was 126 people. Research results (1) The variables of budget implementation, budget planning, procurement of goods and services, and administrative records have a positive and significant effect on the absorption of the Central Java Provincial Government's APBD, (2) The variable of human resource quality does not affect the absorption of the APBD, (3) The independent variables together -the same influence on APBD absorption also has significant positive results.*

**Keywords :** *HR Quality, Budget Implementation, Budget Planning, Procurement of Goods and Services, Administrative Records, Budget Absorption*

**ABSTRAK**

Otonomi daerah memberi kebebasan mengelola sumber daya sesuai dengan kepentingan, prioritas dan peluang lokal, serta bertanggung jawab kepada publik. Anggaran memegang peran yang krusial dalam Pemerintahan Daerah, karena anggaran digunakan untuk menjalankan program kegiatan yang direncanakan oleh instansi tersebut. Setiap instansi dituntut untuk transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam menggunakan anggaran agar terciptanya *good governance*. Penelitian ini berfokus pada pendekatan kuantitatif dengan tujuan menjelaskan analisis data numerik dengan metode statistik untuk mengetahui pengaruh kualitas SDM, pelaksanaan anggaran, perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan pencatatan administrasi terhadap penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh langsung dari partisipan melalui pengisian kuesioner. Populasi penelitian terdiri dari 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan jumlah sampel sebanyak 126 orang. Hasil penelitian (1) Variabel pelaksanaan anggaran, perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pencatatan administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, (2) Variabel kualitas SDM tidak mempengaruhi penyerapan APBD, (3) Variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi penyerapan APBD juga mempunyai hasil positif signifikan.

**Kata Kunci:** *Kualitas SDM, Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Pengadaan Barang dan Jasa dan Penyerapan Anggaran*

**PENDAHULUAN**

Pemerintahan yang dijalankan di Indonesia pada awal kemerdekaan

menganut sistem sentralisasi, sehingga sangat sulit untuk merealisasikan cita-cita yang tertuang dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebabkan luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan lahirnya UU No.32 Tahun 2004 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi sebuah kebijakan pengelolaan keuangan melalui otonomi daerah.

Menurut Bastian (2015) menjelaskan bahwa anggaran merupakan motor penggerak yang digunakan sebagai landasan pengeluaran dan penerimaan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) menjelaskan anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Menurut Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik.

Permasalahan penyerapan anggaran satuan kerja yang cenderung rendah di awal tahun dan merupakan pola penyerapan anggaran yang kurang baik dilihat dari sisi perencanaan maupun manajemen kas. Selain itu tidak sesuai dengan harapan pemerintah bahwa proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran seharusnya dapat berlangsung tepat waktu, lebih merata dan memberikan *multiplier effect* yang besar kepada kegiatan perekonomian.

Salah satu permasalahan dalam penyerapan anggaran pemerintah adalah melesetnya target penyerapan anggaran terutama di semester I sehingga terjadi adanya kurang optimalnya belanja

pemerintah di triwulan akhir terutama belanja modal. Sebagian besar SKPD sangat rendah tingkat penyerapan anggarannya di awal tahun anggaran, kemudian terjadi peningkatan pada triwulan berikutnya dan baru terjadi peningkatan secara signifikan di triwulan terakhir. Penyerapan anggaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kualitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa dan pencatatan administrasi.

Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu, yang mengacu kepada keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan suatu kegiatan dengan baik yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Suatu sistem dapat berjalan dengan maksimal apabila didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang baik dan berkualitas, begitupun dengan penyerapan anggaran. Dalam penelitian terdahulu oleh Safpremi & Putri (2022) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas sumber daya manusia maka kepercayaan masyarakat akan terjaga sehingga penyerapan anggaran akan maksimal.

Aspek perencanaan yang tidak tepat dalam penentuan anggaran yang akan disajikan berdampak pada tidak optimalnya program kegiatan kerja dengan baik, hal tersebut disebabkan tidak sejalanannya perencanaan anggaran dan program kerja yang akan diimplementasikan sehingga menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya daya serap anggaran. Dalam penelitian Safpremi & Putri (2022) menyatakan bahwa perencanaan anggaran

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, tetapi penelitian lain oleh Ulandari, dkk (2021) menyatakan sebaliknya bahwa perencanaan anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan implemetasi dari perencanaan anggaran yang telah disusun. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan anggaran adalah “suatu dokumen yang dibuat untuk dijadikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran”. Dalam penelitian Sari & Indriasari (2023) menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran, tetapi penelitian lain oleh Ferdinan, dkk (2020) menyatakan sebaliknya bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Secara umum pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran, dan berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Dalam penelitian Ulandari, dkk (2021) menyatakan bahwa pengadaan barang & jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, tetapi penelitian lain oleh Anggita & Budi (2023) menyatakan sebaliknya bahwa pengadaan barang & jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Administrasi dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kegiatan

yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan. Jika bagian administrasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka hasil dari proses dalam pencapaian tujuan pun dapat tercapai. Dalam penelitian Putra, dkk (2021) menyatakan bahwa pencatatan administrasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, tetapi penelitian lain oleh Harahap, dkk (2020) menyatakan sebaliknya bahwa pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Penyerapan anggaran pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengharuskan pengelolaan anggaran belanja dapat dikelola dengan lebih baik lagi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa dan pencatatan administrasi terhadap penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Teori Stewardship***

Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Menurut Donaldson & Davis dalam Oktaliza *et al* (2020) menjelaskan bahwa teori *stewardship* ini berasumsi bahwa manajemen sebagai pihak yang berintegritas tinggi, memiliki kejujuran dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.

Dalam teori ini manajer akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Berdasarkan asumsi teori *stewardship* yang menyatakan bahwa manajer akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan (pemenuhan kebutuhan) manajer atau steward dan pemilik atau prinsipal berasal dari organisasi yang kuat dan juga secara ekonomi. Menurut Oktaliza *et al* (2020) implikasi dari teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

### **Pengaruh Kualitas SDM terhadap Penyerapan Anggaran**

Desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Dengan kata lain sumber daya manusia adalah faktor determinan keberhasilan desentralisasi. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Sumber daya manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran adalah staf yang berpengalaman dan mempunyai motivasi. Sumber daya manusia (SDM) menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan.

Penelitian terdahulu oleh Safpremi & Putri (2022) menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, penelitian lainnya oleh Ulandari, dkk (2021) menyatakan hasil yang senada bahwa kualitas SDM berpengaruh positif & signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

### **Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran**

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Perencanaan menentukan semua aktivitas yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Penetapan sasaran program yang tepat melalui perencanaan yang optimal dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan. Setiap organisasi yang telah menetapkan sasaran (goal) yang diformulasikan ke dalam rencana anggaran lebih mudah untuk mencapai target kinerjanya sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri. Sebuah anggaran tidak hanya sekedar mengandung rencana dan jumlah nominal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan/program, tetapi juga mengandung sasaran yang ingin dicapai organisasi.

Penelitian terdahulu oleh Safpremi & Putri (2022) menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, selain itu dalam penelitian Sari & Indriasari (2023) juga menyatakan hasil yang sama yakni bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan

terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

### **Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran**

Pelaksanaan anggaran merupakan implementasi dari perencanaan anggaran yang telah disusun. Faktor terpenting dalam pelaksanaan anggaran adalah proses pelaksanaan anggaran itu sendiri. Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja, proses pengadaan barang dan jasa, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Semakin baik pelaksanaan anggaran maka penyerapan anggaran akan semakin baik. Hal ini akan mempengaruhi satuan kerja (agent) menjalankan tupoksinya sejalan dengan tujuan organisasi dan seperti yang diinginkan masyarakat (principal).

Penelitian terdahulu oleh Sari & Indriasari (2023) menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, selain itu juga terdapat penelitian serupa oleh Anggita & Budi (2023) yang juga menyatakan bahwa anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

### **Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran**

Secara umum pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran, dan berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Proporsi anggaran pengadaan barang jasa lebih dari 30-40 persen porsi yang besar tersebut dikarenakan pengadaan barang jasa merupakan kegiatan Pemerintah yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian.

Penelitian terdahulu oleh Ulandari, dkk (2021) menyatakan bahwa pengadaan barang & jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, selain itu juga terdapat penelitian lainnya oleh Gagola, dkk (2018) yang menyatakan bahwa pengadaan barang & jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

### **Pengaruh Pencatatan Administrasi terhadap Penyerapan Anggaran**

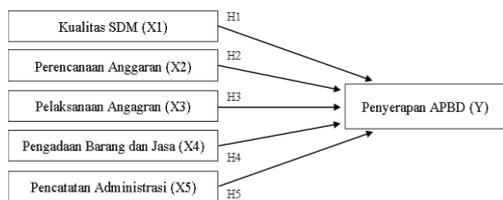
Administrasi dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa administrasi menjadi salah satu bagian dari proses pembangunan, karena kegiatan yang dilakukan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan daerah yang disusun dalam sistem pemerintahan. Jika bagian

administrasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka hasil dari proses dalam pencapaian tujuan pun dapat tercapai. Administrasi juga dapat dikatakan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan.

Penelitian terdahulu oleh Putra, dkk (2021) menyatakan bahwa pencatatan administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:  
 H5 : Pencatatan Administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

**Kerangka Pemikiran Teoritis**

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



**METODE PENELITIAN**

**Populasi dan Sampel Penelitian**

Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiyono (2016). Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Subbag Keuangan,

Pejabat Pengadaan dan Bendahara Pengeluaran OPD pada 42 OPD yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah 126. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode total sampling, yang berarti seluruh populasi digunakan sebagai sampel yaitu sebanyak 126 responden.

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Mas'ud (2004) data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui sumber perantara) dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan cara membagi, serta menarik angket yang telah disebar selama satu minggu, dan melakukan skoring terhadap angket.

**Uji Instrumen Penelitian**

**Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner oleh Ghozali (2016). Dalam penelitian ini digunakan uji validitas item dengan menggunakan kriteria internal, yaitu membandingkan kesesuaian tiap komponen pertanyaan dengan total skor keseluruhan. Sebuah indikator dalam sebuah instrumen dinyatakan valid apabila memiliki nilai KMO lebih dari 0,5 dan *loading factor* di atas 0,4. KMO (Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling) digunakan untuk mengkonfirmasi sebuah faktor atau konstruk. KMO berupa indek

perbandingan jarak antara koefisien korelasi dengan koefisien korelasi parsialnya.

### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana data dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali pada subyek yang sama atau dapat dikatakan untuk menunjukkan adanya persesuaian antara sesuatu yang diukur dengan jenis alat pengukur yang dipakai. Dalam pengujian reliabilitas ini menggunakan rumus Cronbach Alpha. Sedangkan untuk reliabilitas, apabila nilai  $\alpha > 0,7$  maka instrumen yang digunakan adalah reliable.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan :

#### **Metode Deskriptif**

Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai responden dan variabel-variabel penelitian, sehingga dapat menjadi patokan analisis lebih lanjut. Alat analisis yang digunakan di sini adalah jumlah sampel ( $n$ ), minimum, maksimum, mean (rata-rata), median, mode dan standar deviasi.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan

nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016)

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam persamaan model regresi linear, salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Glejser untuk memprediksi apakah terjadi gejala heterokedastisitas atau tidak. Apabila diperoleh nilai signifikan  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak terjadi gejala heterokedastisitas (Ghozali,2016).

#### **Uji Multikolinearitas**

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai cut off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10 (Ghozali, 2016).

### **Analisis Regresi Berganda**

Model regresi menurut Ghozali (2016) adalah model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari

berbagai variabel independen terhadap satu variabel dependen. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda (multiple regresional analisis). Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun rumus yang dipakai yaitu : Model persamaan regresi yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Penyerapan APBD

X1 = Kualitas SDM

X2 = Perencanaan Anggaran

X3 = Pelaksanaan Anggaran

X4 = Pengadaan Barang dan Jasa

X5 = Pencatatan Administrasi

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

e = Error

### Uji Kelayakan Model

#### Uji Koefisiensi Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya persentase *goodness of fit* dari variabel independent terhadap variabel dependent menurut Ghazali (2016).

#### Uji F

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05, menurut Ghazali (2016).

#### Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t menunjukkan apakah variabel Independen secara partial atau individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya, menurut Ghazali (2016). Adapun kriteria hipotesis diterima bila taraf signifikan ( $\alpha$ ) < 0,05.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Uji Instrumen

#### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu indikator yang berbentuk kuesioner. Adapun pengujian validitas variabel penelitian ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas**

No	Variabel	Nilai KMO	Indikator	Nilai Loading Factor	Ket
1	Kualitas SDM (X1)	0,860	X1.1	0,830	Valid
			X1.2	0,809	Valid
			X1.3	0,880	Valid
			X1.4	0,667	Valid
			X1.5	0,778	Valid
			X1.6	0,809	Valid
			X1.7	0,809	Valid
			X1.8	0,535	Valid
2	Perencanaan Anggaran (X2)	0,855	X2.1	0,601	Valid
			X2.2	0,862	Valid
			X2.3	0,864	Valid
			X2.4	0,829	Valid
			X2.5	0,825	Valid
			X2.6	0,751	Valid
3	Pelaksanaan Anggaran (X3)	0,876	X3.1	0,520	Valid
			X3.2	0,780	Valid
			X3.3	0,849	Valid
			X3.4	0,822	Valid
			X3.5	0,771	Valid
			X3.6	0,717	Valid
			X3.7	0,813	Valid
4	Pengadaan Barang dan jasa (X4)	0,828	X4.1	0,830	Valid
			X4.2	0,893	Valid
			X4.3	0,562	Valid
			X4.4	0,795	Valid
			X4.5	0,773	Valid
5	Pencatatan Administrasi (X5)	0,875	X5.1	0,792	Valid
			X5.2	0,786	Valid
			X5.3	0,765	Valid
			X5.4	0,822	Valid
			X5.5	0,886	Valid
			X5.6	0,837	Valid
6	Penyerapan Anggaran (Y)	0,885	Y.1	0,694	Valid
			Y.2	0,833	Valid
			Y.3	0,850	Valid
			Y.4	0,766	Valid
			Y.5	0,838	Valid
			Y.6	0,807	Valid

Sumber : Hasil Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel 1 di atas nilai KMO semua variabel yang terdiri dari kualitas SDM, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pencatatan administrasi

dan penyerapan anggaran sudah memenuhi kriteria kecukupan sampel yang disyaratkan dalam uji validitas, yaitu KMO lebih dari 0,5 maka dapat dinyatakan bahwa sampel yang ada sudah mencukupi, sehingga uji faktor dapat dilanjutkan. Sedangkan pada hasil component matrix, dapat dilihat bahwa semua indikator dalam variabel kualitas SDM, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pencatatan administrasi dan penyerapan anggaran memiliki loading factor yang disyaratkan nilai komponen matriknya lebih besar dari 0,4, sehingga instrumen tersebut dikatakan valid.

#### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana data dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali pada subyek yang sama.

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Alpha Cronbach	Nilai Standarisasi	Ket
1	Kualitas SDM (X1)	0,863	0,700	Reliabel
2	Perencanaan Anggaran (X2)	0,863	0,700	Reliabel
3	Pelaksanaan Anggaran (X3)	0,861	0,700	Reliabel
4	Pengadaan Barang dan Jasa (X4)	0,805	0,700	Reliabel
5	Pencatatan Administrasi (X5)	0,898	0,700	Reliabel
6	Penyerapan Anggaran (Y)	0,882	0,700	Reliabel

Sumber : Hasil Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel diperoleh nilai *Alpha Cronbach* > 0,70. Dengan demikian, hasil uji reliabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliabel, sehingga layak untuk diujikan ke pengujian selanjutnya.

#### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat suatu penyimpangan pada model regresi sehingga menghasilkan uji statistik pada model regresi yang akurat.

#### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		121
Normal Parameters,a,b	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,24762480
Most Extreme Differences	Absolute	0,109
	Positive	0,110
	Negative	-0,106
Test Statistic		0,109
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	0,105d

Sumber : Hasil Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi normal. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai Monte Carlo, sig 0,105 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Glejser untuk memprediksi apakah terjadi gejala heterokedastisitas atau tidak.

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Sig.
1 (Constant)	0,248
Kualitas SDM	0,103
Perencanaan Anggaran	0,308
Pelaksanaan Anggaran	0,439
Pengadaan Barang dan Jasa	0,804
Pencatatan Administrasi	0,212

Sumber : Hasil Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Glejser menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, karena tingkat signifikans semua variabel diatas 0,05 sehingga dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.

**Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel bebas. Model regresi linear yang baik yaitu dimana tidak terjadi masalah multikolonieritas.

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kualitas SDM	0,316	3,169
Perencanaan Anggaran	0,428	2,335
Pelaksanaan Anggaran	0,287	3,482
Pengadaan Barang dan Jasa	0,356	2,809
Pencatatan Administrasi	0,386	2,591

Sumber : Hasil Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji Multikolonieritas pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa tidak terdapat masalah multikolonieritas karena koefisien regresi antar variabel independen mempunyai nilai *tolerance value* lebih besar dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10.

**Uji Regresi Berganda**

Model regresi adalah model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari berbagai variabel independen terhadap satu variabel dependen. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda (*Multiple regresional analisis*). Hasil analisis regresi liner berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6 Ringkasan Uji Regresi Linier Berganda**

No	Variabel	b	Sig	Keterangan
1	Pengaruh kualitas SDM terhadap Penyerapan APBD	0,069	0,440	H1 ditolak

2	Pengaruh perencanaan anggaran terhadap Penyerapan APBD	0,145	0,060	H2 diterima
3	Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap Penyerapan APBD	0,175	0,063	H3 diterima
4	Pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap Penyerapan APBD	0,226	0,008	H4 diterima
5	Pengaruh pencatatan administrasi terhadap Penyerapan APBD	0,355	0,000	H5 diterima

Sumber : Hasil Data Primer diolah, 2024

Pengaruh kualitas SDM terhadap penyerapan anggaran.

Koefisiensi regresi untuk variabel kualitas SDM sebesar 0,069 dan tingkat signifikan  $0,440 > \alpha 0,1$  (taraf signifikansi 10%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas SDM yang dimiliki maka penyerapan anggaran tidak akan ikut meningkat. Berdasar pada hasil tersebut maka dapat dinyatakan **Hipotesis 1 ditolak**.

Pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

Koefisiensi regresi untuk variabel perencanaan anggaran sebesar 0,145 dengan tingkat signifikan  $0,060 < \alpha 0,1$  (taraf signifikansi 10%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik perencanaan anggaran yang dimiliki maka penyerapan anggaran akan ikut meningkat dengan signifikan. Berdasar pada hasil tersebut maka dapat dinyatakan **Hipotesis 2 diterima**.

Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

Koefisiensi regresi untuk variabel pelaksanaan anggaran sebesar 0,175 dengan tingkat signifikan  $0,063 < \alpha 0,1$  (taraf signifikansi 10%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan

anggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik pelaksanaan anggaran yang dimiliki maka penyerapan anggaran akan ikut meningkat dengan signifikan. Berdasar pada hasil tersebut maka dapat dinyatakan **Hipotesis 3 diterima**.

Pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran.

Koefisiensi regresi variabel pengadaan barang dan jasa sebesar 0,226 dengan tingkat signifikan  $0,008 < \alpha < 0,05$  (taraf signifikansi 5%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengadaan barang dan jasa yang dimiliki maka penyerapan anggaran akan ikut meningkat dengan signifikan. Berdasar pada hasil tersebut maka dapat dinyatakan **Hipotesis 4 diterima**

Pengaruh pencatatan administrasi terhadap penyerapan anggaran.

Koefisiensi regresi variabel pencatatan administrasi sebesar 0,355 dengan tingkat signifikan  $0,000 < \alpha < 0,05$  (taraf signifikansi 5%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pencatatan administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik pencatatan administrasi yang dimiliki maka penyerapan anggaran akan ikut meningkat dengan signifikan. Berdasar pada hasil tersebut maka dapat dinyatakan **Hipotesis 5 diterima**.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Penyerapan Anggaran APBD**

Hasil penelitian kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dilingkungan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik

kualitas SDM yang dimiliki maka penyerapan anggaran tidak akan ikut meningkat. Hal ini tidak senada dengan penelitian sebelumnya oleh Safpremi & Putri (2022) & Ulandari, dkk (2021) yang menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif & signifikan terhadap penyerapan anggaran. Penelitian ini memberikan pernyataan bahwa dalam penyerapan anggaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mampu dipengaruhi faktor kualitas sumber daya manusia secara efektif.

Sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam mendukung kinerja suatu instansi. Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada efektifitas kinerja satuan kerja. Penyerapan anggaran SKPD akan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang dimiliki satuan kerja juga baik. Tetapi dalam penelitian ini tidak membuktikan kualitas SDM berdampak pada penyerapan anggaran.

### **Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran APBD**

Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik perencanaan anggaran yang dimiliki penyerapan anggaran akan ikut meningkat dengan signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Safpremi & Putri (2022) & Sari & Indriasari (2023) yang

menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dengan demikian hasil penelitian ini mampu menjelaskan bahwa dengan adanya tingkat perencanaan anggaran yang tinggi mampu mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara lebih maksimal.

Perencanaan berperan penting dalam sebuah organisasi karena semua kegiatan yang perlu dan akan dilakukan harus direncanakan terlebih dahulu agar apa yang menjadi tujuan atau *goals* organisasi dapat terencana secara terstruktur. Perencanaan yang baik tentunya dikarenakan partisipasi yang baik antar atasan dan bawahan serta penyusunan anggaran dibuat sesuai dengan kebutuhan OPD terkait. Jika pengelola anggaran dapat menyusun perencanaan dengan baik, maka program kerja/kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. Namun sebaliknya apabila perencanaan kegiatan yang kurang matang akan berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaannya.

#### **Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran APBD**

Hasil penelitian pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik pelaksanaan anggaran penyerapan anggaran akan ikut meningkat dengan signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Sari & Indriasari (2023) dan Anggita & Budi (2023) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan

signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dengan demikian hasil penelitian ini mampu menjelaskan bahwa dengan adanya tingkat pelaksanaan anggaran yang tinggi mampu mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara lebih maksimal.

Pelaksanaan anggaran didalam pengelolaan keuangan daerah baru dapat dilaksanakan setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pelaksanaan anggaran merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan anggaran akan tercapai dengan baik apabila perencanaan anggaran sudah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Kedua hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran.

#### **Pengaruh Pengadaan Barang & Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran APBD**

Hasil penelitian pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengadaan barang dan jasa yang dimiliki maka penyerapan anggaran akan ikut meningkat dengan

signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Ulandari, dkk (2021) dan Gagola, dkk (2018) yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini mampu menjelaskan bahwa dengan adanya tingkat pengadaan barang dan jasa yang tinggi mampu mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara lebih maksimal.

Proses pengadaan barang jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran, dan berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Realisasi atas pembayaran kegiatan merupakan serapan anggaran. Kegagalan target penyerapan anggaran terkait pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh Pemerintah akan berakibat hilangnya manfaat belanja karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang berarti adanya uang menganggur (*idle money*). Hal ini apabila berkaitan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana) untuk fasilitas umum maka dampak keterlambatan ini akan mengakibatkan keterlambatan atas manfaat yang akan diterima dan dinikmati oleh masyarakat sebagai pemberi amanah (*principal*).

### **Pengaruh Pencatatan Administrasi Terhadap Penyerapan Anggaran APBD**

Hasil penelitian pencatatan administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik pencatatan administrasi yang dimiliki maka penyerapan anggaran akan ikut meningkat dengan signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian

terdahulu oleh Putra, dkk (2021) yang menyatakan bahwa pencatatan administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dengan demikian hasil penelitian ini mampu menjelaskan bahwa dengan adanya tingkat pencatatan administrasi yang tinggi mampu mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara lebih maksimal.

Pencatatan administrasi memiliki peranan penting terhadap tingkat penyerapan anggaran. Pencatatan administrasi yang dilaksanakan secara baik, yaitu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan akan meningkatkan tingkat penyerapan anggaran. Administrasi Pemerintah Daerah merupakan keseluruhan bentuk penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pencatatan administrasi akan menjadi bukti bagi pemerintah dalam menjalankan serta mempertanggungjawabkan kegiatan sehingga administrasi yang menunjang berjalannya roda pemerintah wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang & jasa dan pencatatan administrasi dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel independen tersebut merupakan faktor yang sangat perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu kualitas SDM secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, hal ini

menunjukkan bahwa kualitas SDM tidak mempengaruhi peningkatan penyerapan anggaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Secara bersama-sama kualitas SDM, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang & jasa dan pencatatan administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

#### **SARAN**

Bagi Pemerintah Jawa Tengah, setiap OPD menganalisa dan mengevaluasi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang & jasa serta pencatatan administrasi dalam upaya peningkatan penyerapan anggaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian kualitas SDM yang tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, karena kurangnya pelatihan dan ketidaksesuaian penempatan keahlian dengan tupoksi pekerjaan. Setiap OPD perlu untuk memperbaiki sistem tata kelola organisasi dan juga memperbanyak pelatihan supaya pegawai meningkat kemampuannya dalam mengelola keuangan.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian lainnya baik variabel independen, moderating maupun mediasi untuk mengetahui yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran. Pengembangan kuesioner penelitian, dengan menambahkan indikator-indikator pertanyaan yang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga menghasilkan data yang lebih akurat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Halim. 2015. *Manajemen Keuangan Bisnis: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Achmadi, Abu dan Narbuko Cholid. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi. Aksara.
- Ahmad Yani. 2013. *Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggita, M. S. dan Budi, Y. A. B. 2023. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Direktorat Jenderal Anggaran. *Jurnal Ekonomi Trisakti*. Vol. 3. No. 1. pp. 1339-1350.
- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. 2015. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Devas, Nick dkk. 2010. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., dan Tomasowa, T. E. D. 2018. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit*. Vol. 3. No. 2. pp. 46–56.
- Ferdinan., Isnurhadi., Widiyanti, M., Adam, M. 2020. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol. 17. No. 2. pp.117-134.
- Gagola, L. S., Sondakh, J. J., dan Warongan, J. D. L. 2017.

- Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* Vol. 8. No.1. pp. 108–117.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Cetakan ke VIII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. A. S., Taufik, T., dan Nurazlina. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran ( Studi Empiris pada OPD Kota Dumai ). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, Vol. 13. No 1, pp. 1–10.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Mudah Memahami & Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pert. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., dan Putri, A. M. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*.
- Putra, F. B., Kennedy, dan Zarefar, A. 2021. Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada OPD Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol.14 No 2. pp 221–230.
- Ramdhani, D., dan Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran. *Jurnal Riser Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–148.
- Safpremi, Y., dan Putri, A.M. 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pasaman. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 7 No 2. pp 188–199.
- Sari, N.D., Maria, dan Indriasari, D. 2023. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal of Economic, Business dan Accounting*, Vol. 6 No 2. pp 1896–1915.
- Shenny, Anggaeni. 2012. *Hubungan Penyusunan Anggaran Belanja Modal Dengan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Modal. Studi pada Pemerintah*

*Kabupate/Kota Wilayah IV  
Priangan Jawa Barat.  
Universitas Pendidikan  
Indonesia.*

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian  
Pendidikan Pendekatan  
Kuantitatif, Kualitatif, dan  
R&D.* Bandung: Alfabeta

Ulandari, V., Akram dan Santoso, B.  
2021. Faktor-Faktor yang  
Mempengaruhi Penyerapan  
Anggaran Belanja pada Satuan  
Kerja Perangkat Daerah  
Dengan Administrasi Sebagai  
Pemoderasi. *E-Jurnal  
Akuntansi, Vol. 31 No 6.* pp  
1577–1591.